

## **COMMUNITY BASED TOURISM PADA MASYARAKAT PESISIR; DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI**

**Siti Arieta**

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

### **ABSTRACT**

Coastal communities are extremely tied by alienation and poverty. In the meantime, a lot of potentials are included to be economically independent. Remote location is one of the high values of tourism if it supported by the clean environment, hospitality and cultural authenticity.

During the time coastal communities are considered as a backward and unsuccessfully achieved communal power. Community skills among women and younger generations are not aroused in an integrated and maximum approach. As a consequence, empowerment and community-based activities are offered as an alternative solution. Empowerment in this study is in the field of tourism as a potential of coastal regions. It is believed that the empowerment and community-based tourism will be able to maximize the creativity of all components in coastal communities, creating new job opportunity, preserve local culture and environment, and also improve the income of the community in order to establish economic independence.

This exploratory type of research has data collecting technique through a survey of literature and experience. Community based tourism concept is expected to be effectively applied in coastal regions of Indonesia. Supported by both government and private sectors, community power is generated as a capital to expect autonomy establishment in order to meet the needs of coastal communities, improve the quality of life without ignoring local wisdoms in the environmental management.

Keywords: *tourism, community based, community development*

### **PENDAHULUAN**

Komunitas pesisir pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada hasil laut. Beruntung bagi mereka yang di sekitar wilayah tinggalnya terdapat gunung, bukit atau lahan dimana kekayaan alam selain laut dapat menjadi alternatif mata pencaharian saat masa paceklik melaut tiba. Namun secara umum, masyarakat pesisir identik dengan ketertinggalan pembangunan dengan alasan keterpencilan lokasi. Kondisi inilah yang menunjukkan kesenjangan tingkat kesejahteraan antara masyarakat daratan dan pesisir.

Lokasi pesisir yang terpencil juga merupakan nilai jual yang tinggi dari sudut pandang pariwisata konvensional. Investor

telah memanfaatkan peluang ini untuk merubah keterpencilan pesisir menjadi objek wisata yang perawan dan eksklusif, yang diperuntukkan bagi wisatawan yang ingin sekejap mengasingkan diri dari hiruk-pikuk keseharian dan menikmati keeksotisan pantai yang indah dan bersih. Jenis wisata semacam ini merupakan privatisasi yang tidak terelakkan, yang mana disatu sisi memberikan kepuasan ibarat di surga kepada para wisatawan namun di sisi lain menutup akses partisipasi bagi masyarakat pesisir untuk memanfaatkan potensi perekonomian. Tidak adanya akses masyarakat untuk berpartisipasi dikarenakan hal-hal antara lain asumsi investor bahwa masyarakat pesisir memiliki keterbatasan kemampuan berinteraksi, tingkat pendidikan yang rendah, tidak menjaga kebersihan pantai dan pesisir, dan lain sebagainya.

Disahkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) membawa harapan perubahan bagi pengembangan kawasan pesisir dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara umum program PEMP memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial. Tujuan ini diimplementasikan melalui prioritas kegiatan antara lain meningkatkan akses permodalan melalui *micro finance*; terfasilitasinya teknologi tepat guna untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan; berkembangnya jaringan informasi usaha, permodalan dan pemasaran; dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pesisir.

Walaupun kebijakan ini lebih banyak diimplementasikan dari segi pemberdayaan ekonomi yakni dengan memberikan tambahan modal usaha bagi para nelayan, penulis ingin melihat aturan ini sebagai pijakan dasar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di bidang kepariwisataan. Adapun spesifikasi dari kepariwisataan adalah pariwisata berbasis komunitas atau *community based tourism* dimana pemberdayaan jenis ini menurut sudut pandang penulis dapat menciptakan kondisi lingkungan yang berkelanjutan sekaligus memandirikan perekonomian komunitas pesisir.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan *community based tourism* yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan kemandirian komunitasnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas antara lain untuk menambah wawasan di wilayah teoritik dalam bidang *community based tourism* dan impelementasinya dan sebagai referensi dan acuan mengenai kegiatan berbasis komunitas dalam upaya

memberdayakan masyarakat lokal sebagai aktor perubahan sosial yang mandiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan jenis penelitian eksploratori, yakni penelitian yang bertujuan untuk lebih mendalami atau memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala (Soehartono:33). Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - Maret 2010. Proses penelitian dimulai dengan melihat gejala yang terjadi berkaitan dengan *Community Based Tourism*, lalu mempelajari gejala tersebut melalui bahan tertulis, baik pada buku teks maupun yang lebih khusus seperti artikel-artikel pada media cetak, internet dan pengalaman pribadi tertentu yang paham akan topik ini.

Penelitian eksploratori ini ditunjang oleh teknik pengumpulan data antara lain survei literatur dan pengalaman. Survei literatur dilakukan untuk memperoleh sumber data primer yakni dari buku teks dan data sekunder antara lain dari artikel jurnal, media cetak dan internet. Adapun survei pengalaman dilakukan dengan mencari informasi dari orang-orang yang ahli atau berpengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di bidang pariwisata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan sektor kepariwisataan di kawasan pesisir selama ini telah mengikutsertakan banyak investor swasta yang telah terbukti dapat memajukan pembangunan. Terlebih lagi ketika pemberian izin pengelolaan ini bersifat eksklusif dalam artian sangat jauh dari jangkauan wisatawan dan masyarakat lokal, namun memberikan kontribusi yang signifikan dan menjanjikan. Tidak menutup kemungkinan Pemerintah merasakan hal yang dilematis, terutama Pemerintah Daerah yang berusaha menaikkan Pendapatan Asli Daerahnya. Namun kerjasama semacam ini tidak pula menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketertinggalan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir.

Idealnya, keberhasilan pariwisata (Syamsu:2001) dimaknai oleh terpenuhinya:

- (1) Faktor kelangkaan (*Scarcity*) yakni sifat dari objek wisata tidak dapat dijumpai di tempat lain, baik secara alami maupun buatan.
- (2) Faktor kealamiahannya (*Naturalism*) yakni sifat dari objek wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia, seperti warisan budaya.
- (3) Faktor Keunikan (*Uniqueness*) yakni sifat objek wisata yang memiliki keunggulan dibanding dengan objek lain di sekitarnya.
- (4) Faktor pemberdayaan masyarakat (*Community empowerment*), dimana masyarakat lokal diberdayakan untuk pengembangan objek wisata di daerahnya, sehingga memiliki rasa memiliki rasa bangga dan identitas diri yang kuat untuk menumbuhkan keramahan kepada wisatawan.
- (5) Faktor Optimalisasi lahan (*Area optimalisation*) yakni memaksimalkan kawasan wisata sesuai dengan mekanisme pasar (permintaan dan penawaran) tanpa melupakan pertimbangan konservasi, preservasi, dan proteksi lingkungan.
- (6) Faktor Pemerataan (*equality*) dimana terdapat pembagian porsi manfaat terbesar bagi masyarakat yang kurang beruntung agar terciptanya pemerataan kesejahteraan juga ditunjang dengan adanya ketertiban dalam proses pemerataan tersebut.

Penelitian ini menekankan keberhasilan pariwisata pesisir dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep memunculkan kekuatan komunitas secara *bottom up*. Aspek pemberdayaan mendorong terciptanya kesadaran penuh dari masyarakat untuk mengelola kawasan wisata yang berdampak terjaminnya keramahan, kelestarian budaya dan lingkungan. Untuk menciptakan kesadaran tersebut dibutuhkan perubahan pola pikir dari komunitas untuk mau meningkatkan kapasitas mereka dalam menjadi pengggagas, perencana, pelaksana, dan pemantau dari kegiatan kepariwisataan yang dijalankan. Manfaat yang dirasakan antara lain adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perluasan

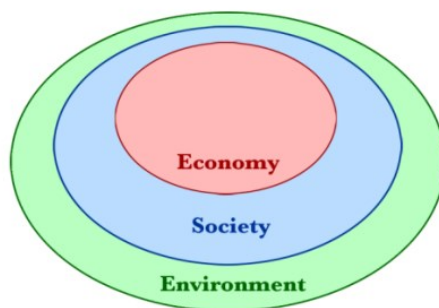
lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di wilayah pesisir serta terpeliharanya kearifan lokal dalam kehidupan kepariwisataan. Kewajiban dari dalam diri untuk menjaga lingkungan juga akan menciptakan kepariwisataan yang berkelanjutan, yakni beroperasi dengan kapasitas alami untuk regenerasi dan masa depan produktifitas alam, sosial dan budaya; mengakui kontribusi dimana masyarakat dan komunitas, kebiasaan dan gaya hidup sekarang dan yang akan datang menjadi pengalaman bagi pariwisata; menerima bahwa masyarakat memiliki pembagian yang adil dan wajar dari keuntungan pariwisata; diarahkan kepada masyarakat dan komunitas di sekitar wilayah wisata.

Dengan berjalannya pembangunan sektor kepariwisataan berbasis pemberdayaan masyarakat, berarti pariwisata berkelanjutan telah berjalan. Pariwisata berkelanjutan adalah industri yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan budaya lokal, dengan membantu meningkatkan pendapatan, pekerjaan, dan konservasi ekosistem setempat. Implementasi pariwisata berkelanjutan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam bentuk *community based tourism* atau pariwisata berbasis komunitas, dimana konsep ini didukung oleh kegiatan antara lain *adventure travel* atau wisata petualangan, *cultural travel* atau wisata budaya, dan *ecotourism* atau wisata ekologi. Keberhasilan *community based tourism* dalam memberikan kesan khusus kepada wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir hanya bisa dicapai dengan dukungan penuh dan kerjasama permanen antara pemerintah, pihak luar baik investor maupun lembaga pendampingan masyarakat, dan komunitas lokal.

Indikator keberhasilan *community based program* (dimana pariwisata berbasis komunitas termasuk didalamnya) sebagai implementasi nyata upaya menjalankan pembangunan yang berkelanjutan adalah berjalannya manajemen kelompok yang tercermin melalui uji produktivitas dan uji pemberdayaan. Uji produktivitas memiliki tolak ukur kapasitas manajemen ini terhadap upaya pemenuhan kebutuhan komunitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Sedangkan uji pemberdayaan adalah untuk melihat

bagaimana basis lokal dalam kontrol yang efektif terhadap sumberdaya telah diperkuat dan diperluas. Uji pemberdayaan dari *community based tourism* idelanya tercermin dari ekoliterasi dan ekodesain masyarakat pesisir dalam pelaksanaan kepariwisataan. Ekoliterasi adalah kesadaran ekologis masyarakat atas kaidah-kaidah ekosistem dan evolusinya untuk mendukung jaring-jaring kehidupan. Sedangkan ekodesain adalah memperkenalkan era yang didasari oleh pembelajaran dari alam, bukan pada apa yang bisa didapatkan dari alam (Capra, 2005:253).

Dengan demikian, untuk menjalankan *community based tourism* sangatlah mutlak diperlukan pemahaman akan lingkungan yang berkesinambungan. Setelah kesadaran lingkungan (baca:ekoliterasi) terbentuk, maka ekodesain adalah langkah implementatifnya. Tidak mudah membentuk kesadaran lingkungan mengingat segala aktivitas perekonomian manusia identik dengan memanfaatkan alam. Aktivitas ekonomi sangat erat kaitannya dengan sumberdaya alam dan lingkungan, dan tidak dipungkiri bahwasanya masyarakat dan perekonomian dibatasi oleh lingkungan.



**Gambar 1. Ketergantungan Terhadap Lingkungan**  
Sumber: Susilo (2008)

Artinya masyarakat tidak bisa hidup tanpa lingkungan begitupun perekonomian tidak akan berjalan tanpa adanya sumberdaya alam. Itulah sebabnya mayoritas kearifan lokal di suku ataupun negara apapun menegaskan untuk melakukan penghormatan terhadap lingkungan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, bagi mereka yang telah memiliki kesadaran lingkungan yang terjadi adalah pemanfaatan dimana keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian tetap dijaga. Namun sebaliknya, bagi mereka yang belum memiliki kesadaran lingkungan yang akan terjadi adalah eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem alam.

Berikut ini adalah keterkaitan antara ekoliterasi dan ekodesain yang sangat mungkin untuk tercipta dalam *Community Based Tourism* dimana akan memberikan keuntungan bagi lingkungan, budaya, dan ekonomi komunitas lokal. Ekoliterasi yang dimiliki masyarakat pesisir akan sangat

menunjang berjalannya kegiatan *ecotourism* atau wisata ekologi merupakan faktor penentu yang menghubungkan *community based tourism* dengan lingkungan berkelanjutan. Aktivitas ini diimplementasikan melalui kunjungan ke tempat alamiah di sekitar pesisir, seperti menelusuri berbagai kekayaan flora dan fauna di hutan pantai atau melihat biota unik di bawah laut melalui snorkeling dan menyelam. Wisata ekologi mutlak melakukan konservasi atau pemeliharaan lingkungan untuk menopang keseimbangan hubungan manusia dan segala kegiatannya, bukan sebaliknya mengubah keaslian sehingga mengganggu keseimbangan alam. Berikut ini adalah kriteria bagi masyarakat pesisir dalam menjalankan *ecotourism*:

1. Wisatawan diajak untuk berpartisipasi dalam mengamati, mengapresiasi dan menghargai ekosistem pesisir dalam kesatuan budaya tradisionalnya;
2. Memberikan pendidikan dan interpretasi mengenai ekosistem

- pesisir dan laut dalam upaya memperkenalkan kearifan lokal pesisir kepada wisatawan;
3. Komunitas pesisir memiliki kelompok yang terspesialisasi untuk mendampingi wisatawan dimana kelompok ini melakukan koordinasi dan kerjasama baik dengan masyarakat setempat dan kelompok luar dalam menjalankan ecotourism;
  4. Seminin mungkin mengurangi dampak negatif pada lingkungan alam dan sosial-budaya lokal;
  5. Mendukung perlindungan daerah alam.

Aktifitas wisatawan dalam menikmati alam juga ditunjang dengan kesiapan komunitas dalam menyediakan tempat tinggal berupa pondokan alami (*eco-lodge*). Sosialisasi langsung antara wisatawan dengan masyarakat di lingkungan pesisir akan secara langsung memperkenalkan budaya lokal. Disinilah masyarakat dituntut untuk mampu secara merata untuk membuktikan kearifan lokal mereka, seperti tradisi ritual melaut, menjaga kelestarian terumbu karang, membuat kerajinan dari biota laut yang diperbolehkan, menghidangkan kuliner khas pesisir bukan dari spesies yang dilindungi, dan lain sebagainya. Untuk itu, masyarakat wajib memiliki tingkat pengetahuan yang sama akan hal-hal yang erat kaitannya dengan wisata pesisir dimana akan lebih baik apabila kearifan lokal dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Uji produktivitas tergambar melalui adanya manajemen kelompok yang berjalan secara efektif yang akan tercipta ketika seluruh anggota kelompok atau komunitas sadar akan kemampuannya masing-masing dalam berpartisipasi mewujudkan tujuan bersama. *Community based resources management* atau manajemen sumberdaya berbasis komunitas menandakan komunitas telah berdaya dan bertindak sebagai subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tujuan bersama. Logika pemberdayaan didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat pasti memiliki daya yang terkadang tidak disadari atau masih belum dapat diketahui secara nyata. Berdasarkan asumsi ini, maka dikatakan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong,

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya. Dalam proses pengembangan kemampuan komunitas dimungkinkan adanya intervensi dari pihak luar namun terbatas hanya untuk memberikan stimulan untuk memacu perkembangan kemampuan komunitas termasuk peningkatan kreativitas dan tanggung jawab mereka.

Dukungan pihak luar ini sesuai dengan prinsip "*help people to help themselves*" yang menjelaskan dukungan pihak luar bertujuan untuk menciptakan prakarsa dan partisipasi komunitas, dengan adanya konsekuensi dibutuhkannya waktu yang relatif lama dalam proses tersebut (Soetomo, 1990:64). Program *community development and empowerment* atau pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah program yang dinilai sesuai untuk memunculkan *community power*. Proses pemberdayaan masyarakat menurut pengalaman Bina Swadaya meliputi tahap – tahap sebagai berikut: *pertama*, tahap penggalian dan penggugahan masyarakat menurut motivasi dan proses penyadaran kelompok. *Kedua*, tahap pembentukan organisasi dan pemahaman prinsip – prinsip swadaya dan kerjasama. *Ketiga*, tahap konsolidasi dan stabilisasi masyarakat yaitu penerapan prinsip manajemen dalam organisasi. *Keempat*, tahap pengembangan produksi dan pemasaran yaitu dengan peningkatan berusaha dan kewiraswastaan. *Kelima*, tahap lepas landas yaitu mampu menjaga kontinuitas kelompok, mampu berpartisipasi dalam usaha – usaha pengembangan yang lebih di desa dan di luar desa (Mualifaf S:1999).

Perubahan pemahaman, sikap dan perilaku dalam menunjang manajemen kelompok yang efektif akan sangat bergantung pada komunitas. Pihak diluar komunitas baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan dan pemberdayaan selayaknya memiliki strategi penyelesaian atau *exit strategy* agar komunitas tidak menjadi tergantung. *Exit strategy* dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian dan memampukan masyarakat (Kartasasmita, 1995:18-20) yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Mengkreasikan iklim yang menunjang motivasi dan membangkitkan

- kesadaran atas potensi yang dimiliki adalah esensi dari pemberdayaan;
2. Penguatan potensi masyarakat melalui langkah nyata yakni akses pada peningkatan taraf kesejahteraan dan ketersediaan infrastruktur serta pelayanan sosial;
  3. Perlindungan dan keberpihakan pada yang lemah guna mencegah subordinasi dari yang kuat namun harus ditegaskan bahwasanya keberpihakan ini bukan untuk menciptakan suatu ketergantungan.

Untuk selanjutnya, komunitas akan melakukan pemberdayaan mandiri dimana inisiatif awal berasal dari komunitas yang dikenal sebagai Manajemen Sumberdaya Berbasis Komunitas atau *Community Based Resources Management* (CBRM). Hakikat dari manajemen sumberdaya berbasis komunitas adalah bahwasanya masyarakat harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan prioritas kelompok, memantau serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Dalam manajemen berbasis komunitas, baik pengalaman pribadi, pengetahuan lokal, pengertian dan kearifan menjadi sangat dihargai dan diimplementasikan dalam keswadayaan. Strategi manajemen sumberdaya berbasis komunitas mengarah pada penguatan komunitas untuk dapat mengembangkan sistem dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun kolektif (Soetomo:2008).

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini tentunya tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dan pembinaan baik oleh pihak Pemerintah Daerah maupun pihak swasta. Dukungan pihak luar ini dapat berupa kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas di sektor yang esensial bagi masyarakat antara lain perihal partisipasi, hak asasi manusia, kepemimpinan, lingkungan, kebijakan dan hukum, media dan lain sebagainya. Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat merupakan dasar terbentuknya kesadaran dalam memunculkan kemampuan. Pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) dan manajerial juga dibutuhkan untuk mendukung keahlian tradisional yang telah dimiliki masyarakat dan meningkatkan pola

pemeliharaan sistem mata pencaharian. Pada masyarakat pesisir, pengembangan *life skills* yang dapat dilakukan sesuai tema penelitian ini adalah meliputi kegiatan yang dapat menunjang kepariwisataan komunitas, antara lain menangkap hasil laut, berkebun, pelatihan pemandu wisata, produksi souvenir, *food garnish* atau seni menghias makanan, desain rumah sehat tradisional, administrasi, pemasaran dan lain sebagainya. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini merupakan pijakan dasar bagi masyarakat yang merasa telah mampu untuk melanjutkan aktivitas ini menjadi program manajemen berbasis komunitas.

Kawasan pesisir yang dijadikan wilayah pariwisata berbasis komunitas dengan tidak terelakkan akan menjadi suatu kawasan yang berkembang. Tujuan dari pengembangan komunitas ini antara lain pemberian solusi bersama terhadap problematika sosial ekonomi yang dihadapi komunitas berupa dukungan pendapatan ekonomi keluarga; penggalian serta pemanfaatan potensi komunitas baik secara geografis kewilayahan, keadaan penduduk, serta sumber daya manusia; memaksimalkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir untuk menjaga kelestarian lingkungan agar pemanfaatannya berkelanjutan baik oleh generasi sekarang maupun generasi akan datang; sebagai wahana pembelajaran bisnis bagi masyarakat pesisir dimana masyarakat akan terlibat langsung dalam sistem administrasi dan manajemen bisnis yang dijalankan oleh komunitas; menciptakan peluang-peluang kerja bagi masyarakat dan memberikan kesempatan untuk bergabung pada wadah pengelolaan kepariwisataan komunitas untuk bersama memajukan dan mengembangkannya dan pada gilirannya dapat memberikan kompensasi pendapatan; membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan konsep kepariwisataan yang berkesinambungan; memperkenalkan sekaligus melestarikan kebudayaan lokal kepada wisatawan.

Spesialisasi yang dapat dilakukan dalam manajemen pariwisata berbasis komunitas sebagai bentuk keefektifan manajemen kelompok antara lain pembagian kelompok pemandu untuk mengajak wisatawan mengeksplorasi wilayah pesisir melalui kegiatan keliling kampung, berkemah,

bersepeda, maupun wisata kebun; kelompok kesenian untuk menampilkan budaya tradisional; kelompok makanan yang bertanggung jawab atas konsumsi wisatawan selama kunjungan; kelompok nelayan untuk wisata memancing di laut dengan menggunakan perahu maupun peralatan tradisional; kelompok pengrajin untuk menyediakan cinderamata khas komunitas; kelompok administrasi, koordinasi dan pemasaran untuk mengatur segala kegiatan dan pengembangan kepariwisataan. Hal ini bukan saja mencerminkan suatu manajemen kelompok yang baik, namun membuktikan bahwasanya komunitas telah mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi para anggotanya.

Peran kelompok kecil yang terspesialisasi, atau dapat disebut sebagai kader pemberdayaan yakni wajib melakukan peningkatan kapasitas komunitasnya dalam hal pengetahuan lingkungan juga inovasi-inovasi di bidang kerajinan untuk buah tangan. Kelompok ini jugalah yang akan melakukan pengaturan pendistribusian kegiatan *community based tourism* secara adil antara lain pembagian tempat tinggal dan pemanduan wisatawan kepada komunitas sehingga kontribusi ekonomi akan dirasakan secara merata.

Tidak menutup kemungkinan masyarakat pesisir yang telah atau akan melaksanakan aktivitas *Community Based Tourism* menjalin kesepakatan kerjasama dengan pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan kualitas dan mengaplikasikan inovasi-inovasi baru. Biasanya, kesepakatan ini dijalankan dalam bentuk *joint partnership* dimana setiap pihak wajib memberikan kontribusi langsung terhadap jalannya kegiatan. Kontribusi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir dapat berupa lahan atau lokasi, dimana terdapat kesepakatan berupa ketersediaan masyarakat untuk menjadikan wilayah kemukimannya untuk lokasi pariwisata pesisir. Dukungan oleh pemerintah maupun swasta dapat berupa pembangunan pondokan yang layak bagi wisatawan namun tetap mencerminkan keaslian dan ketradisionalitas. Hasil kebun dan tangkapan laut yang dimiliki oleh masyarakat juga dapat dijadikan kontribusi kepada pemerintah atau swasta, terlebih lagi jika pihak swasta bergerak di bidang kepariwisataan.

Masyarakat pesisir dapat menjadi pemasok buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan laut untuk mencukupi kebutuhan pihak swasta dalam menjalankan kegiatannya, jika kesepakatan ini dijalankan artinya masyarakat telah memiliki pasar khusus atas hasil alam dan perekonomian komunitas akan menjadi lebih baik. Kepastian distribusi hasil alam yakni pertanian, perkebunan maupun perikanan komunitas, masyarakat akan terpacu untuk memproduksi. Hal ini akan menciptakan peluang-peluang kerja dan dengan demikian dapat menambah penghasilan masyarakat serta sebagai wahana pembelajaran komunitas untuk mengembangkan kemampuan dalam menjalankan usaha.

Sasaran utama *community based tourism* lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap guna menumbuhkan kembali semangat dan jiwa bisnis mereka.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perempuan namun tidak menutup akses bagi laki-laki untuk berpartisipasi adalah dalam penyediaan makanan dan cinderamata khas komunitas. Kaderisasi generasi muda untuk tetap menjalankan *community based tourism* secara berkelanjutan adalah melalui pelatihan yang kemudian akan membantu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bakat seni diarahkan untuk kelompok kesenian, keahlian bahasa asing diarahkan untuk menjadi pemandu, keahlian koordinasi dan pemasaran diarahkan menjadi tenaga administrasi dan pengembangan, dan lain sebagainya. Kaderisasi ini akan menjamin kesinambungan kepariwisataan yang berkelanjutan sekaligus melatih generasi muda untuk bekerja secara baik, terampil dan kreatif.

Komunitas pesisir yang telah menerapkan *community based tourism* dapat dikatakan telah melaksanakan pembangunan yang bersifat *bottom up* secara berkelanjutan. Menurut Stren, While & Whitney (dalam Budiharjo:2005:18) inti pembangunan berkelanjutan adalah penghormatan interaksi harmonis antara tiga sistem yakni sistem biologis atau sumberdaya alam, sistem ekonomi dan sosial (*triple P – planet, people, profit*). Berikut ini adalah gambaran atas perbandingan dimensi ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet) dalam teori,

kenyataan dan perubahan yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan yang akan menjamin kelestarian

sumberdaya alam dan lingkungan di masa yang akan datang.



The three pillars of sustainable development, from left to right, the theory, the reality and the change needed to better balance the model

**Gambar 2. Visualisasi Pembangunan Berkelanjutan**  
Sumber: Adams (2006)

Lingkungan pesisir berkelanjutan yang akan tercipta melalui *community based tourism* menandakan bahwasanya akan tercipta pula masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Maknanya adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Capra,2003:250).

Hasil dari penelitian ini adalah *community based tourism* yang dilakukan oleh masyarakat pesisir merupakan sebuah konsep yang sangat tepat untuk diaplikasikan. Dengan menerapkan pariwisata berbasis komunitas artinya masyarakat telah mampu merancang dan mengoperasikan dengan maksimal segala aktifitas pariwisata sesuai dengan karakteristik wilayah melalui tolok ukur uji produktivitas (manajemen kelompok) dan uji pemberdayaan (ekoliterasi dan ekodesain). Kawasan pesisir dijadikan sebagai suatu kekuatan dalam membangun perekonomian komunitas, namun tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal serta menjaga kesinambungan lingkungan alam untuk generasi mendatang. Untuk selanjutnya, pengawasan dan perbaikan mutu pelayanan mutlak dibutuhkan untuk

menjaga kualitas pariwisata yang berkelanjutan.

Sekali lagi ditegaskan, berjalannya *community based tourism* di kawasan pesisir akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan Pemerintah yang mayoritas bersifat karitatif dan berdampak menimbulkan ketergantungan. Namun kepariwisataan berkelanjutan yang dilakukan oleh komunitas akan menumbuhkan kemandirian pada tiap individu, sehingga sumberdaya manusia pesisir akan mengalami peningkatan kualitas sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Dengan demikian, sasaran dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki komitmen dalam pemberdayaan masyarakat antara lain Pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, investor swasta di sektor kepariwisataan pesisir sebagai kontribusinya dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan, lembaga akademis yang melakukan pendampingan dan pengabdian masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat baik lokal maupun asing.



Tidak mudah mengimplementasikan sebuah konsep yang ideal terlebih lagi ketika masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan sistem pembangunan yang sifatnya *bottom up*. Mengubah pemikiran dan kecenderungan untuk bergantung pada pihak lain bukan merupakan sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Namun inilah esensi dari pengembangan dan pemberdayaan, yakni mendorong masyarakat untuk memunculkan kekuatan mereka agar mampu berdiri sendiri dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup, disertai kearifan dalam mempertahankan budaya lokal dan mengelola lingkungan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, Terima kasih dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semangat dan ketenangan dalam menyelesaikan penelitian ini;

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan wawasan dalam mendalami ekowisata: Yayasan Eko Lestari Wisata Sri Bintang (Yelas) dan Taman Nasional Bali Barat yang menjadi acuan utama saya dalam penulisan ini, juga pihak-pihak pengelola ekowisata di daerah lainnya di Pulau Jawa dan Sulawesi;

Kolega-kolega saya pada kegiatan *Community Development, Empowerment* dan Advokasi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa barat, terima kasih atas *sharingnya*, semoga cita-cita kita dalam memandirikan komunitas akan terwujud;

Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu publikasi tulisan ini dalam bentuk jurnal (PPSPL Umrah), Pak Hengky, Pak Doni dan rekan-rekan lain di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W.M. (2006), *The Future of Sustainability Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century*. Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting. The World Conservation Union. [www.iucn.org](http://www.iucn.org)
- Capra, F. (2003), *The Hidden Connection: Strategi Sistemik untuk Melawan Kapitalisme Baru*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Kartasmita, G (1995), *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi*, Malang.
- Mu'alifah, S. (1999), *Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sekitar Kawasan Hutan Jati Melalui Kelompok Tani Hutan*, Skripsi Jurusan Ilmu Sosiatri, Universitas Gadjah Mada.
- Soehartono, I. (2004), *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soetomo, (1990), *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2008), *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Susilo, R.K.D (2008), *Sosiologi Lingkungan*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syamsu, Y. (2001), *Penerapan Etika Perencanaan pada Kawasan Wisata, Studi Kasus di Kawasan Agrowisata Salak Pondoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah, Vol 5/ No. 3 Maret 2001, LP3M STP Tri Sakti, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir